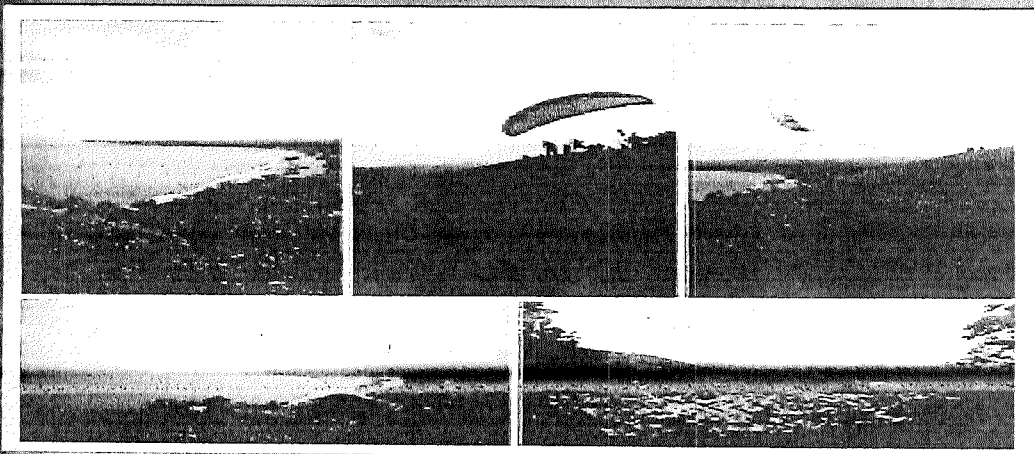


PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
INSPEKTORAT

CALK

DES 2017



INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
JL. Pahlawan Painan 25611 TELP/FAX (0758) 21601
E-MAIL : INSPEKTORATRESSEL@YAHOO.CO.ID

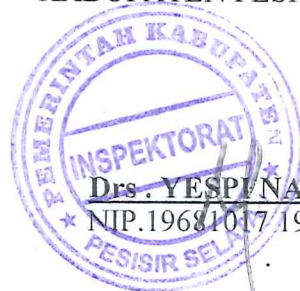
KATA PENGANTAR

Puji syukur kami ucapkan kehadirat Allah SWT, atas rahmat dan karuniaNya Laporan Keuangan Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan, Tahun Anggaran 2017 telah dapat tersusun sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sebagaimana yang diamanatkan Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Peraturan Pemerintah RI No.8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Perangkat Daerah selaku Entitas Akuntansi berkewajiban menyelenggarakan penatausahaan dan akuntansi atas pelaksanaan DPA Perangkat Daerah dengan menyusun Laporan Keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca disertai dengan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Inspektorat telah berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah meskipun masih banyak kekurangan- kekurangannya. Informasi yang disajikan di dalamnya telah disusun sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sehingga diharapkan dapat memenuhi kebutuhan berbagai pihak yang kepentingan.

Laporan Keuangan ini disusun dan disampaikan kepada Bupati Pesisir Selatan melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah untuk dikompilasi dan menjadi bagian dari Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan. Diharapkan, melalui media pelaporan ini dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan DPA di Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan.

INSPEKTUR
KABUPATEN PESISIR SELATAN



Drs. YESPI NAWIARSIH
NIP.196810171989031003

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan terdiri dari : (a.) Laporan Realisasi Anggaran, (b) Neraca dan (c) laporan Operasional (d) Laporan Perubahan Ekuitas (e) Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2017 sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, posisi keuangan dan catatan atas laporan keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah.

Painan, 31 Desember 2017
INSPEKTUR
KABUPATEN PESISIR SELATAN,



Drs. YESPI NAWIARSIH
NIP. 19681017 198903 1 003

PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
INSPEKTORAT
PER 31 DESEMBER TAHUN 2017 DAN 2016

No.	URAIAN	Ref. CALK	2017	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	2016
1	2	3		4		5
1	ASET					
2	ASET LANCAR					
3	Kas di Bendahara Pengeluaran		-	-	-	-
4	Kas di Bendahara Penerimaan		-	-	-	-
5	Kas Lainnya		-	-	-	-
6	Piutang Pajak		-	-	-	-
7	Penyisihan Piutang Pajak		-	-	-	-
8	Piutang Pajak Netto		-	-	-	-
9	Piutang Retribusi		-	-	-	-
10	Penyisihan Piutang Retribusi		-	-	-	-
11	Piutang Retribusi Netto		-	-	-	-
12	Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan		-	-	-	-
13	Penyisihan Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan		-	-	-	-
14	Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan Netto		-	-	-	-
15	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi Daerah		-	-	-	-
16	Penyisihan Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi Daerah		-	-	-	-
17	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi Daerah Netto		-	-	-	-
18	Piutang Lain-lain PAD yang Sah		-	-	-	-
19	Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah		-	-	-	-
20	Piutang Lain-lain PAD yang Sah Netto		-	-	-	-
21	Piutang kepada Pihak Ketiga		-	-	-	-
22	Piutang Lainnya		-	-	-	-
23	Penyisihan Utang		-	-	-	-
24	Beban Dibayar Dimuka		-	-	-	-
25	Persediaan		1.431.320,00	1.431.320,00	2.959.710,00	2.959.710,00
26	Aset Lancar Lainnya		-	-	-	-
27	Jumlah Aset Lancar		1.431.320,00	1.431.320,00	2.959.710,00	2.959.710,00
28	ASET TETAP					
29	Tanah		37.000.000,00	-	-	37.000.000,00
30	Peralatan dan Mesin		1.999.294.181,00	91.230.000,00	-	1.908.064.181,00
31	Gedung dan Bangunan		1.995.227.852,00	19.965.000,00	-	1.975.262.852,00
32	Jalan, Irigasi, dan Jaringan		-	-	-	-
33	Aset Tetap Lainnya		56.997.500,00	5.000.000,00	-	51.997.500,00
34	Konstruksi dalam Pengerjaan		-	-	-	-
35	Akumulasi Penyusutan		(1.533.591.427,49)	-	-	(1.533.591.427,49)
36	Jumlah Aset Tetap (46 s/d 52)		2.554.928.105,51	116.195.000,00	-	2.438.733.105,51
37	ASET LAINNYA					
38	Tagihan Piutang Penjualan Angsuran		-	-	-	-
39	Tagihan Tuntutan Perbendaharaan		-	-	-	-
40	Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah		-	-	-	-
41	Kemungkinan kerugian Pihak Ketiga		-	-	-	-

42	Aset Tidak Berwujud		-	-	-	-
43	Akumulasi Amortisasi		-	-	-	-
44	Aset Non Lancar Lainnya		-	-	-	-
45	Aset Lain-lain		-	-	-	-
46	Jumlah Aset Lainnya		-	-	-	-
47	TOTAL ASET		2.556.359.425,51	117.626.320,00	2.959.710,00	2.441.692.815,51
48			-	-	-	-
49	KEWAJIBAN		-	-	-	-
50	Kewajiban Jangka Pendek		-	-	-	-
51	Utang Perhitungan Pihak Ketiga		-	-	-	-
52	Utang Bunga Denda dan <i>Commitment Fee</i>		-	-	-	-
53	Pendapatan Diterima Dimuka		-	-	-	-
54	Utang Beban		-	-	-	-
55	Utang Jangka Pendek Lainnya		-	-	-	-
56	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		-	-	-	-
57	TOTAL KEWAJIBAN		-	-	-	-
58			-	-	-	-
59	EKUITAS		-	-	-	-
60	Ekuitas		2.556.359.425,51	-	-	2.441.692.815,51
61	RK PPKD		-	-	-	-
62	TOTAL EKUITAS		2.556.359.425,51	-	-	2.441.692.815,51
63			-	-	-	-
65	TOTAL KEWAJIBAN DAN EKUITAS		2.556.359.425,51	-	-	2.441.692.815,51

Painan, 5 Januari 2018
 Pengguna Anggaran



Drs. YE SP. NAWIARSIH
 NIP. 196810171989031003

PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

INSPEKTORAT DAERAH

LAPORAN OPERASIONAL

Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 30 Desember 2017 DAN 2016

(Uraian rupiah)

URAIAN	2017	2016	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	2	3	4	5
BEBAN				
BEBAN OPERASI - LO				
Beban Pegawai - LO	4.390.410.126,00	0,00	4.390.410.126,00	100,00
Beban Gaji dan Tunjangan - LO	3.177.315.126,00	0,00	3.177.315.126,00	100,00
Gaji Pokok PNS / Uang Representasi - LO	2.390.007.406,00	0,00	2.390.007.406,00	100,00
Tunjangan Keluarga - LO	212.914.980,00	0,00	212.914.980,00	100,00
Tunjangan Jabatan - LO	127.665.000,00	0,00	127.665.000,00	100,00
Tunjangan Fungsional - LO	200.250.000,00	0,00	200.250.000,00	100,00
Tunjangan Fungsional Umum - LO	37.975.000,00	0,00	37.975.000,00	100,00
Tunjangan Beras - LO	125.955.024,00	0,00	125.955.024,00	100,00
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus - LO	4.077.523,00	0,00	4.077.523,00	100,00
Pembulatan Gaji - LO	30.702,00	0,00	30.702,00	100,00
Iuran Jaminan Kesehatan - LO	67.376.792,00	0,00	67.376.792,00	100,00
Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	4.916.721,00	0,00	4.916.721,00	100,00
Iuran Jaminan Kematian (JKM)	6.145.978,00	0,00	6.145.978,00	100,00
Beban Tambahan Penghasilan PNS - LO	995.100.000,00	0,00	995.100.000,00	100,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja - LO	995.100.000,00	0,00	995.100.000,00	100,00
Uang Lembur - LO	11.045.000,00	0,00	11.045.000,00	100,00
Uang Lembur PNS - LO	11.045.000,00	0,00	11.045.000,00	100,00
Honorarium PNS	141.950.000,00	0,00	141.950.000,00	100,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	141.950.000,00	0,00	141.950.000,00	100,00
Honorarium Non PNS	65.000.000,00	0,00	65.000.000,00	100,00
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	65.000.000,00	0,00	65.000.000,00	100,00
Beban Barang dan Jasa	2.855.099.455,00	0,00	2.855.099.455,00	100,00
Beban Bahan Pakai Habis	280.178.900,00	0,00	280.178.900,00	100,00
Beban Persediaan alat tulis kantor	123.950.500,00	0,00	123.950.500,00	100,00
Beban Persediaan alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	9.738.000,00	0,00	9.738.000,00	100,00
Beban Persediaan perangkat, materai dan benda pos lainnya	900.000,00	0,00	900.000,00	100,00
Beban Persediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih	2.296.000,00	0,00	2.296.000,00	100,00
Beban Persediaan Bahan Bakar Minyak/Gas	143.294.400,00	0,00	143.294.400,00	100,00
Beban Persediaan Bahan/ Material	19.965.000,00	0,00	19.965.000,00	100,00
Beban Persediaan bahan baku bangunan	19.965.000,00	0,00	19.965.000,00	100,00
Beban Jasa Kantor	49.887.962,00	0,00	49.887.962,00	100,00
Beban Jasa telepon	12.149.062,00	0,00	12.149.062,00	100,00
Beban Jasa air	3.804.500,00	0,00	3.804.500,00	100,00
Beban Jasa listrik	30.034.400,00	0,00	30.034.400,00	100,00
Beban Jasa surat kabar/majalah	3.900.000,00	0,00	3.900.000,00	100,00
Beban Perawatan Kendaraan Bermotor	144.681.100,00	0,00	144.681.100,00	100,00
Beban Jasa Service	11.000.000,00	0,00	11.000.000,00	100,00
Beban Penggantian Suku Cadang	76.625.000,00	0,00	76.625.000,00	100,00
Beban Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	51.779.950,00	0,00	51.779.950,00	100,00
Beban Pajak Kendaraan Bermotor	5.276.150,00	0,00	5.276.150,00	100,00
Beban Cetak dan Penggandaan	129.225.000,00	0,00	129.225.000,00	100,00
Beban Cetak	129.225.000,00	0,00	129.225.000,00	100,00
Beban Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	100,00
Beban sewa gedung/ kantor/tempat	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	100,00
Beban Sewa Sarana Mobilitas	33.000.000,00	0,00	33.000.000,00	100,00
Beban Sewa Sarana Mobilitas Darat	33.000.000,00	0,00	33.000.000,00	100,00
Beban Makanan dan Minuman	96.187.500,00	0,00	96.187.500,00	100,00
Beban makanan dan minuman harian pegawai	5.720.000,00	0,00	5.720.000,00	100,00
Beban makanan dan minuman rapat	21.275.000,00	0,00	21.275.000,00	100,00
Beban makanan dan minuman tamu	21.389.000,00	0,00	21.389.000,00	100,00

(Dalam rupiah)

URAIAN	2017	2016	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	2	3	4	5
Beban makanan dan minuman pelatihan	6.050.000,00	0,00	6.050.000,00	100,00
Beban makanan dan minuman panitia	30.250.000,00	0,00	30.250.000,00	100,00
Beban makanan dan minuman peserta	11.512.500,00	0,00	11.512.500,00	100,00
Beban Perjalanan Dinas	1.878.821.393,00	0,00	1.878.821.393,00	100,00
Beban perjalanan dinas dalam daerah	1.460.595.000,00	0,00	1.460.595.000,00	100,00
Beban perjalanan dinas luar daerah dalam propinsi	163.690.000,00	0,00	163.690.000,00	100,00
Beban perjalanan dinas luar daerah luar propinsi	254.536.393,00	0,00	254.536.393,00	100,00
Beban Pemeliharaan	50.852.900,00	0,00	50.852.900,00	100,00
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	38.931.900,00	0,00	38.931.900,00	100,00
Beban Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	11.921.000,00	0,00	11.921.000,00	100,00
Beban Beasiswa Pendidikan PNS	132.249.700,00	0,00	132.249.700,00	100,00
Beban kursus-kursus singkat/ pelatihan	132.249.700,00	0,00	132.249.700,00	100,00
Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	5.400.000,00	0,00	5.400.000,00	100,00
Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga	5.400.000,00	0,00	5.400.000,00	100,00
Beban Jasa Pihak Ketiga	30.150.000,00	0,00	30.150.000,00	100,00
Beban Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur	30.150.000,00	0,00	30.150.000,00	100,00
JUMLAH BEBAN OPERASI - LO	7.245.509.581,00	0,00	7.245.509.581,00	100,00
JUMLAH BEBAN	7.245.509.581,00	0,00	7.245.509.581,00	100,00
SURPLUS/DEFISIT LO	(7.245.509.581,00)	0,00	(7.245.509.581,00)	100,00

Paman, 30 Desember 2017

Inspektur



Drs. Y. D. H. Wiarsih

Nip. 19650111999031003

PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

3.00.01.01 - Inspektorat Daerah

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Untuk Periode yang Berakhir Sampai dengan 30/Des/2017 DAN 2017

URAIAN	2017	2016
RK PPKD	7.341.739.581,00	0,00
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR	0,00	0,00
JUMLAH EKUITAS AKHIR	7.341.739.581,00	0,00

PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

3.00.01.01 - Inspektorat Daerah

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Untuk Periode yang Berakhir Sampai dengan 30/Des/2017 DAN 2017

	2017	2016
RK PPKD	7.341.739.581,00	0,00
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR	0,00	0,00
JUMLAH EKUITAS AKHIR	7.341.739.581,00	0,00

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	1
Daftar Isi	2
Pernyataan Tanggung Jawab	3
Laporan Keuangan	
A. Laporan Realisasi Anggaran	4
B. Neraca	5
C. Laporan Operasional	6
D. Laporan Perubahan Ekuitas	7
E. Catatan atas Laporan Keuangan	
1. Pendahuluan	8
2. Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBD	8
3. Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan	11
4. Kebijakan Akuntansi	13
5. Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan	18
D. Lampiran – lampiran	
1. Daftar Persediaan ATK per 31 Desember 2017	
2. Daftar Rincian Pendapatan Asli Daerah Tahun 2017.....	
3. Daftar Rincian Belanja Modal Tahun 2017	
4. Laporan Fungsional Per Rincian Obyek Tahun 2017.....	

E. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

I. PENDAHULUAN

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah , tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan ditetapkan dalam Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 31 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja, dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan adalah melaksanakan kewenangan Otonomi Daerah dibidang Pengawasan dan pemeriksaan berdasarkan peraturan perundang- undangan dan ketentuan.

Sejalan dengan tugas pokok tersebut, Inspektorat , memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, review, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan bupati;
- d. penyusunan laporan hasil pengawasan;
- e. pelaksanaan administrasi inspektorat; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Inspektorat dimaksud sebagai bentuk pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan dan Anggaran (DPA) Tahun Anggaran 2017. Laporan Keuangan disusun meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional , Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan Atas Laporan Keuangan sehingga laporan keuangan diharapkan terwujudnya Tarnsparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Perangkat Daerah. Laporan Keuangan menyajikan informasi tentang Anggaran dan Realisasi atas pendapatan dan belanja serta menunjukkan tingkat ketercapaian target yang telah disepakati antara Legislatif dan Eksekutif sedangkan Neraca merupakan Laporan Keuangan menyajikan secara wajar tentang Asset, Kewajiban dan Ekuitas dana

yang mengungkapkan secara penuh kegiatan Inspektorat dalam menyelenggarakan Pemerintahan.

Prosedur Penyusunan Laporan Keuangan

Dalam proses penyusunan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2017 Perangkat Daerah Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Landasan hukum yang mendasari penyusunan laporan keuangan adalah :

1. Undang – Undang Dasar Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Negara ;
4. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 .
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pokok– Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 09 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2017.
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 06 Tahun 2016 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2017.
13. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 28 Tahun 2017 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2017.

1.3 Sistematika Penulisan CALK

Catatan atas laporan keuangan merupakan penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional , Laporan Perubahan Ekuitas dan Neraca. Catatan atas Laporan Keuangan mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan yang wajar.

Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan Tahun Anggaran 2017 meliputi hal-hal berikut:

- Pendahuluan
- Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBD
- Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan
- Kebijakan Akuntansi yang penting
- Penjelasan pos-pos laporan keuangan
- Informasi Keuangan Lainnya

II. IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

Ekonomi Makro

Inspektorat adalah salah satu Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan wajib di bidang Pemerintahan Umum yang melaksanakan tugas pokok membantu Bupati dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintah kabupaten. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Inspektorat mempunyai anggaran yang berisi program dan kegiatan yang terdiri dari 5 Program dan 26 kegiatan.

Kebijakan Keuangan

Kebijakan keuangan Inspektorat dalam mengelola DPA tahun Anggaran 2017 meliputi hal sebagai berikut :

Kebijakan Pendapatan

Sesuai dengan tugas pokok yang melekat pada Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan yaitu melaksanakan pengawasan, maka Inspektorat Kabupaten tidak melaksanakan pengelolaan dan pemungutan Pendapatas Asli Daerah .

Kebijakan Belanja

Kebijakan belanja Inspektorat dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan wajib pemerintahan umum yang menjadi kewenangannya . Dalam rangka melaksanakan urusan wajib tersebut telah dialokasikan anggaran pada APBD tahun 2017 sebesar Rp 7.651.771.129,- dan terealisasi sebesar Rp. 7.341.739.581,- yang digunakan untuk :

1. Belanja tidak langsung sebesar Rp 4.267.112.312,-
2. Belanja langsung sebesar Rp 3.384.658.817,-

Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan pendapatan daerah, penyusunan APBD berpedoman pada RKPD dalam rangka memberikan pelayanan pada masyarakat secara optimal dan tercapainya tujuan bernegara. APBD mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi,

distribusi dan stabilisasi Dalam menyusun APBD, penganggaran pengeluaran daerah terdiri dari : belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah, yang dialokasikan secara adil dan merata agar relatif dapat dinikmati oleh masyarakat tanpa diskriminasi, khususnya dalam pemberian pelayanan umum. Selain itu juga dilakukan pendekatan kinerja melalui pendekatan alokasi biaya yang direncanakan/ dianggarkan dalam DPA dikaitkan dalam tingkat pelayanan atau hasil yang diharapkan dapat dicapai . Dengan demikian DPA Inspektorat disusun berdasarkan sasaran tertentu yang hendak dicapai dalam satu tahun anggaran.

Dalam rencana kerja tahun 2017 Inspektorat menetapkan 5 program yang didukung oleh 26 kegiatan untuk menunjang penyelenggaraan pemerintahan yaitu:

NO.	PROGRAM/ KEGIATAN
I.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
2	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
3	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
4	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
5	Penyediaan Alat Tulis Kantor
6	Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan
7	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
8	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
9	Penyediaan Makanan dan Minuman
10	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
11	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah
II.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
12	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
13	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
14	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor
15	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional
III	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
16	Pendidikan dan Pelatihan Formal

IV.	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
17	Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala
18	Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah
19	Inventarisasi Temuan Administrasi
20	Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan
21	Review Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
22	Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
23	Evaluasi Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)
24	Evaluasi Sosialisasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
V.	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan
25	Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan
26	Pelatihan Khusus Aparatur Pengawasan pada Kantor Sendiri

2.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, penyajian belanja dan pengeluaran Satuan Kerja dalam Laporan Keuangan dikelompokkan menjadi belanja operasi dan belanja modal.

Pengertian dan jenis belanja tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

- A. *Belanja operasi* merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek.
- B. *Belanja modal* merupakan pengeluaran anggaran untuk memperoleh asset tetap dan lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode (satu tahun anggaran).

- **Pendapatan**

Inspektorat hanya melaksanakan retribusi jasa umum yaitu Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Makan dan Minum) sebesar Rp. 9.618.750.- yaitu 10 % dari dengan realisasi anggaran makan dan minum sebesar Rp. 96.187.500 .

- **Belanja**

Total realisasi belanja Inspektorat Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp. 7.341.739.581, atau 95,95 % dari anggaran yang telah ditetapkan yaitu Rp. 7.651.771.129,-. Rincian lengkap untuk belanja Inspektorat dapat dilihat pada tabel berikut :

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Belanja Operasi :			
Belanja Pegawai	4.491.412.312	4.390.410.126	97,75
Belanja Barang dan jasa	3.061.108.817	2.855.099.455	93,27
Belanja Modal :			
Belanja Modal	99.250.000	96.230.000	96,96
JUMLAH	7.651.771.129	7.341.739.581	95,95

Dari Belanja pegawai yang dianggarkan sebesar Rp 4.491.412.312,- terealisasi sebesar Rp. 4.390.410.126,- atau 97,75 %. terdapat perbedaan realisasi anggaran sebesar Rp. 101.002.186,- Pada belanja barang dan jasa dari anggaran yang direncanakan yaitu sebesar Rp. 3.061.108.817,- terealisasi sebesar Rp. 2.855.099.455,- atau 93,27 % terdapat perbedaan realisasi anggaran sebesar Rp. 206.009.362,-. Sedangkan untuk belanja modal anggaran sebesar Rp 99.250.000,- terealisasi sebesar Rp 96.230.000,- atau 96,96 %, terdapat perbedaan anggaran dengan realisasi sebesar Rp. 3.020.000.-

KEBIJAKAN AKUNTANSI

Kebijakan akuntansi meliputi dasar pengakuan, pengukuran dan pelaporan atas aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, belanja dan pembiayaan serta penyajian pelaporan keuangan sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 123 Tahun 2009 tentang

Kebijakan Akuntansi Pemerintah mengacu kepada ketentuan umum tentang penyajian laporan keuangan instansi pemerintah yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 08 Tahun 2016, Inspektorat merupakan salah satu Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan yang dipimpin oleh seorang Inspektur. Inspektur selaku Pengguna Anggaran / Pengguna barang wajib menyampaikan Laporan Keuangan kepada Kepala Daerah melalui PPKD.

Basis Akuntansi yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah, basis akuntansi yang digunakan dalam Penyusunan Laporan adalah SAP Berbasis AkruaI untuk pengakuan pendapatan, beban, aset, utang dan ekuitas. Dalam Basis AkruaI untuk Laporan Operasional, bahwa pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Daerah dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah. Basis AkruaI untuk Neraca, bahwa aset, kewajiban dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

Asset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas yang dibayar atau sebesar nilai wajar dari imbalan untuk memperoleh aset tersebut pada saat perolehan. Kewajiban dicatat sebesar jumlah kas dan setara kas yang diharapkan akan dibayarkan

untuk memenuhi kewajiban dimasa yang akan datang dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah .

Basis Pengukuran yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Adapun basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan Inspektorat adalah sebagai berikut :

Pengukuran / Penilaian Asset

a. Kas

Dicatat dan disajikan sebesar nilai nominalnya

b. Tanah

Tanah dinilai dengan biaya perolehan yang mencakup harga pembelian / pembebasan, biaya dalam rangka perolehan hak, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai. Apabila penilaian tanah dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai tanah didasari pada nilai wajar / harga taksiran pada saat perolehan.

c. Gedung dan Bangunan

Gedung dan bangunan dinilai dengan biaya perolehan dan jika penggunaan biaya peroleh tidak memungkinkan maka didasarkan pada nilai wajar/taksiran pada saat perolehan. Jika gedung dan bangunan dibangun secara swakelola maka nilainya meliputi biaya langsung tenaga kerja, bahan baku dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan asset tetap tersebut. Jika gedung dan bangunan diperoleh melalui kontrak, biaya perolehan meliputi nilai

~~landas, biaya perolehan dan sebagainya biaya perolehan serta jasa lain-lain.~~

d. Peralatan dan Mesin

Biaya Perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai. Biaya perolehan atas peralatan dan mesin yang berasal dari pembelian meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan. Biaya perolehan Peralatan dan mesin yang diperoleh melalui kontrak, meliputi nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan serta jasa konsultan.

Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintah.

Secara umum kebijakan akuntansi yang diterapkan pada pos-pos laporan keuangan telah sesuai dengan ketentuan Standar Akuntansi Pemerintahan kecuali dalam hal penyajian aset tetap.

Penyajiaannya telah berdasarkan biaya perolehan atau pertukaran (at cost) namun belum memperhitungkan nilai penyusutan atas aktiva tetap tersebut. Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 07, tentang Aktiva Tetap, bahwa Aset Tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan setelah dikurangi dengan akumulasi penyusutan. Hal ini disebabkan belum ditetapkannya umur / masa manfaat atas aset-aset tersebut.

2.2 Hambatan dan Kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan

Pada tahun 2017 capaian kinerja Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan didasarkan pada beberapa indikator dengan masing-masing target yang sudah ditetapkan, keseluruhan indikator telah mencapai target. Demikian juga penanganan pengaduan masyarakat yang berindikasi kerugian negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan sesuai kewenangan Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan dan Perangkat Daerah yang telah menerapkan program aksi pencegahan dan

pemberantasan korupsi telah mencapai target. Cakupan kegiatan pengawasan seperti reviu laporan keuangan sudah menjangkau seluruh Perangkat Daerah namun kegiatan pengawasan dan pembinaan lainnya untuk mempertahankan opini WTP yang telah dicapai belum menjangkau seluruh Perangkat Ddaerah karena adanya keterbatasan SDM.

Kendala yang masih melingkupi rangkaian pelaksanaan pengawasan Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan adalah kepatuhan objek pemeriksaan dalam menindaklanjuti temuan hasil pengawasan terutama tindak lanjut berupa penyetoran kerugian negara yang melibatkan pihak ketiga serta pegawai yang sudah dimutasi atau pensiun dan meninggal dunia masih merupakan kendala dalam rangkaian pelaksanaan pengawasan oleh Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan. Untuk itu peran Tim Penyelesaian kerugian Negara Daerah (TPKN) Kabupaten Pesisir Selatan akan ditingkatkan dengan melibatkannya dalam kegiatan tindak lanjut LHP.

III. PENJELASAN POS – POS PELAPORAN KEUANGAN

3.1 Rincian dari Penjelasan masing – masing Pos -,Pos Pelaporan Keuangan

Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja

Jenis Belanja	Anggaran 2017 Rp.	Realisasi 2017 Rp.
Pendapatan :		
- Pendapatan Retribusi	0	0
Jumlah Pendapatan	0	0
Belanja Operasi		
- Belanja Pegawai	4.491.412.312	4.390.410.126
- Barang & jasa	3.061.108.817	2.855.099.455
Belanja Modal-		

- Tanah	0	0
- Peralatan & Mesin	94.250.000	91.230.000
- Gedung & Bangunan	0	0
- Jln, Irigasi & Jaringan	0	0
- Aset tetap lainnya	5.000.000	5.000.000
JUMLAH BELANJA	7.651.771.129	7.341.739.581
<i>Surplus (Defisit)</i>	<i>(7.651.771.129)</i>	<i>(7.341.739.581)</i>

1. Pendapatan Retribusi

Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan tidak melaksanakan pengelolaan dan pemungutan Pendapat Asli Daerah. Inspektorat hanya melaksanakan retribusi jasa umum yaitu Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Makan dan Minum) sebesar Rp. 9.618.750.- yaitu 10 % dari dengan realisasi anggaran makan dan minum sebesar Rp. 96.187.500 .

2. Belanja Pegawai

Jumlah tersebut merupakan realisasi dari anggaran belanja pegawai (PNS dan Non PNS) Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan pada Tahun Anggaran 2017. Jumlah realisasi dan anggaran belanja tersebut terinci atas :

- *Belanja Tidak Langsung*

- PNS

Perkiraan	Anggaran 2017 (Rp)	Realisasi 2017 (Rp)
Belanja Gaji dan Tunjangan	3.272.012.312	3.177.315.126
Tambahan Penghasilan PNS	995.100.000	995.100.000
Jml. Belanja Tdk Langsung	4.267.112.312	4.172.415.126

Jumlah realisasi belanja pegawai tidak langsung mencapai 97,78 % dari jumlah yang dtanggarkan.

Belanja Pegawai Langsung

Perkiraan	Anggaran 2017	Realisasi 2017
	(Rp)	(Rp)
- Honorarium PNS	148.250.000	141.950.000
- Honorarium Non PNS	65.000.000	65.000.000
- Uang Lembur PNS	11.050.000	11.045.000
<u>Jml. Belanja Peg Langsung</u>	224.300.000	217.995.000

Jumlah realisasi belanja pegawai langsung mencapai 97,19 % dari jumlah yang dianggarkan.

3. Belanja barang dan Jasa

Jumlah tersebut merupakan realisasi dan anggaran belanja barang dalam Tahun Anggaran 2017. Jumlah realisasi belanja barang dan jasa mencapai 93,27 % dari jumlah yang dianggarkan .

Perkiraan	Anggaran 2017	Realisasi 2017
	(Rp)	(Rp)
- Belanja Barang dan Jasa	3.061.108.817	2.855.099.455

4. Belanja Tanah

Dalam tahun anggaran 2017 tidak terdapat anggaran maupun realisasi belanja tanah.

5. Belanja Peralatan & Mesin

Jumlah tersebut merupakan realisasi dan anggaran belanja peralatan dan mesin pada Tahun Anggaran 2017. Jumlah realisasi belanja peralatan dan mesin tersebut terinci atas belanja berikut :

- Pengadaan Alat Kantor Lainnya	Rp. 44.000.000
- Pengadaan Komputer	Rp. 47.230.000

Jumlah	Rp. 91.230.000

Jumlah realisasi belanja peralatan dan mesin tersebut mencapai 96,79 % dari jumlah anggaran tahun 2017.

6. Belanja Gedung & Bangunan

Dalam Tahun Anggaran 2017 tidak terdapat anggaran belanja gedung dan bangunan .

7. Belanja Aset Tetap Lainnya

Dalam Tahun Anggaran 2017 terdapat penambahan anggaran aset tetap lainnya , yaitu belanja buku – buku Perundang – undangan , sebesar Rp. 5.000.000.-

Neraca

No.	Perkiraan	Per 31 Des 2017
A.	Aset Lancar :	
	Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00
	Kas di Bendahara Penerimaan	0,00
	Persediaan	1.431.320,00
	Jumlah Aset Lancar	1.431.320,00
B.	Aset Tetap :	
	Tanah	37.000.000,00
	Peralatan dan Mesin	1.999.294.181,00
	Gedung dan Bangunan	1.995.227.852,00
	Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00
	Aset Tetap Lainnya	56.997.500,00
	<i>Akm .penyusutan asset tetap</i>	<i>(1.533.591.427,49)</i>
	Aset Lainnya	
	Aset Lainnya	0,00
	Jumlah aset tetap	2.554.928.105,51

	Total Aset	2.556.359.425,51
C.	Ekuitas :	
	Ekuitas	2.556.359.425,51
	Surplus / Defisit - LO :	
	Surplus / Defisit - LO	(7.651.771.129,00)
	RK PPKD	
	RK PPKD	7.651.771.129,00
	Jumlah Ekuitas Dana	2.556.359.425,51
	Total Kewajiban & Ekuitas Dana	2.556.359.425,51

1. Kas di Bendahara Pengeluaran

Jumlah Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2017 adalah Rp. 0,-, yang terdiri dari :

- Tunai	Rp.	0.-
- Bank	Rp.	0.-

2. Persediaan

Jumlah Nilai Persediaan Alat Tulis Kantor dan Cetak Per 31 Desember 2017 adalah Rp. 1.431.320.-

3. Tanah

Harga perolehan tanah pada tahun 2016 sebesar Rp. 37.000.000.- sedangkan pada tahun 2017 tetap sama dengan tahun 2017 karena tidak ada penambahan.

4. Peralatan dan Mesin

Harga perolehan peralatan dan mesin pada tahun 2016 sebesar Rp.1,908.064.181,- dan pada tahun 2017 harga perolehan peralatan dan mesin menjadi Rp.1.999.294.181.-

5. Gedung dan Bangunan

Harga perolehan gedung dan bangunan pada Tahun 2016 sebesar Rp. 1.975.262.852.- dan pada tahun 2017 harga perolehan gedung dan bangunan menjadi Rp. 1.995.227.852.-

6. Aset Tetap Lainnya

Jumlah Aset Tetap Lainnya pada Tahun 2016 sebesar Rp. 51.997.500 dan pada tahun 2017 menjadi Rp. 56.997.500.-

7. Aset Lainnya

Jumlah Aset Lainnya pada tahun 2016 sebesar Rp. 0,00.- sedangkan pada tahun 2017 tetap sama dengan tahun 2016 karena tidak ada penambahan.

8. Ekuitas

Ekuitas pada tahun 2016 sebesar Rp. 2.441.692.815,51 sedangkan pada tahun 2017 sebesar Rp. 2.556.359.425,51.-

9. Surplus / Defisit - LO

Surplus / Defisit – LO pada tahun 2017 sebesar (Rp. 7.651.771.129).

10. R/K PPKD

Jumlah tersebut merupakan realisasi penarikan dana dari kas daerah selama tahun 2017.

3.2 PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN

- Kedudukan

Inpektorat Kabupaten Pesisir Selatan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

- Kewenangan

1. Kegiatan pengawasan internal dilingkungan Pemerintah Kabupaten terdiri dari :

- a. Pemeriksaan kinerja/regular SKPD dengan titik berat terhadap pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dilingkungan Pemerintah Kabupaten;
- b. Review Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dalam rangka menuju dan/atau mempertahankan opini “Wajar Tanpa Pengecualian (WTP);
- c. Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan dan asset;
- d. Evaluasi Penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP);
- e. Asistensi terhadap pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 .
- f. Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) untuk mengetahui penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
- g. Evaluasi Rencana Kinerja Anggaran (RKA) .
- h. Melakukan pengawasan tertentu bersama dengan instansi terkait.
- i. Asistensi dalam penyusunan neraca asset pada unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten;
- j. Asistensi penerapan SPIP di lingkungan Pemerintah Kabupaten;
- k. Asistensi perencanaan dan penyusunan Anggaran;
- l. Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan.

2. Pengawasan Urusan Pemerintahan Nagari.

Pengawasan Urusan Pemerintahan Nagari dilakukan terhadap keuangan , administrasi pemerintahan nagari dan pelaksanaan urusan pemerintahan di Pemerintahan Nagari dengan melalui :

- a. Pemeriksaan regular pada Pemerintah Nagari.

- b. Pemeriksaan pelaksanaan tugas pembantuan dari pemerintah Kabupaten sesuai hasil koordinasi; dan
- c. Pemeriksaan khusus terkait dengan adanya pengaduan yang bersumber dari masyarakat maupun dari instansi pemerintah dalam rangka membangun kepekaan terhadap perkembangan isu-isu aktual untuk tujuan nasional dan pemerintah daerah.

C. Tupoksi

Inspektorat mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap urusan pemerintahan di daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan kabupaten.

Dalam menyelenggarakan tugas, Inspektorat mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, review, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan bupati;
- d. penyusunan laporan hasil pengawasan;
- e. pelaksanaan administrasi inspektorat; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

IV. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

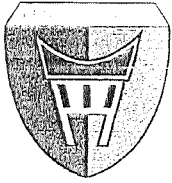
Dalam menjalankan tugas pengawasan oleh Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan, selama Tahun 2017 secara keseluruhan dapat dilihat bahwa pelaksanaan tugas yang diamanahkan telah dilakukan dengan baik dan tidak ada hambatan /kendala yang krusial dalam pelaksanaan anggaran SKPD tahun 2017.

4.2 Saran

1. Peningkatan anggaran dimasa yang akan datang sangat diharapkan untuk lebih meningkatkan kualitas pengawasan yang lebih baik.
2. Diperlukan sosialisasi dan pelatihan tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Palnan, 31 Desember 2017
INSPEKTUR
KABUPATEN PESISIR SELATAN,

Drs. YESPI NAWIARSIH
NIP. 19681017 198903 1 003



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
INSPEKTORAT**

Jln. Pahlawan No. 1 Telp. / Fax. (0756) 21601

PAINAN

**SURAT PERNYATAAN SALDO PERSEDIAAN
PER 31 DESEMBER 2017**

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Drs. YESPI NAWIARSIH
NIP : 19681017 198903 1 003
Jabatan : Inspektur Kabupaten Pesisir Selatan

Dengan ini menyatakan bahwa Saldo Persediaan pada Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan per 31 Desember 2017 adalah Rp. 1.431.320.- (Satu juta empat ratus tiga puluh satu ribu tiga ratus dua puluh rupiah), sesuai dengan rincian terlampir.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya .

Painan , 31 Desember 2017

INSPEKTUR

KABUPATEN PESISIR SELATAN

Drs. YESPI NAWIARSIH

Pemhina Tk. I

NIP. 196810 17 198903 1 003

**DAFTAR PERSEDIAAN
PER 31 DESEMBER 2017
INSPEKTORAT
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH	KET
	ATK					
1	HVS FOLIO 80 Gr	2	rim	55.000	110.000	
2	HVS Kwarto	5	rim	57.000	285.000	
3	Kertas DF Bergaris	4	rim	99.180	396.720	
4	Map snellecter folio	2	pak	144.250	288.500	
5	Box File bahan Karton	6	buah	16.500	99.000	
	Cetak					
6	Amplop Cassing 24x 34	2	kotak	126.050	252.100	
	Jumlah				1.431.320	

Painan, 31 Desember 2017

INSPEKTUR

Drs. YESPI NAWIARSIH
NIP. 19681017 198903 1 003

INSPEKTORAT
KABUPATEN PESIRIS SELATAN
REKAPITULASI BELANJA BARANG & JASA YANG MEMENUHI KRITERIA ASET TETAP
PER 31 DESEMBER 2017
TAHUN ANGGARAN 2017

NO	KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	BELANJA YANG MERUPAKAN ASET TETAP					KET
				NAMA BARANG	VOLUME UNIT	NILAI ASET	BY. PENUNJANG	TOTAL	
1	Keg. Pemert Gedung Bgn Kantor	20.000.000	19.965.000	Pembuatan Teralis	1	19.965.000	-	19.965.000	
2	Penyediaan Bahan Bacaan & buku perundang - undangan	5.000.000	5.000.000	Undang- Undang ASN Aparatur	8	164.000	-	1.312.000	
				Konsep dan Analisis	4	182.500	-	730.000	
				Tuhan maafkan kami sedang sibuk	4	197.500	-	790.000	
				Peternak Ayam Kampung	4	151.500	-	606.000	
				Undang - Undang Pajak Penghasilan	4	203.000	-	812.000	
				Himpunan UU Pengadaan Brg dan Jasa	5	150.000	-	750.000	
	JUMLAH	25.000.000	24.965.000	Jumlah				24.965.000	*

Painan, 2 Januari 2018

INSPEKTUR

Drs. YE P. NAWIARSIH
NIP. 19681017 198903 1 003

INSPEKTORAT
KABUPATEN PESISIR SELATAN
REKAPITULASI BELANJA MODAL
PER 31 DESEMBER 2017
TAHUN ANGGARAN 2017

NO	KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	BELANJA YANG MERUPAKAN ASET TETAP					KET
				NAMA BARANG	VOLUME / UNIT	NILAI ASET	BIAYA PENUNJANG	TOTAL	
1	Keg. Pengad. Perlengkapn Gedung Kantor - Belanja Modal Pengadaan alat Kantor	47.000.000	44.000.000	Bendera dan Marawa	1	10.000.000	-	10.000.000	
				Msein Absensi	1	30.000.000	-	30.000.000	
				Papan Informasi	2	2.000.000	-	4.000.000	
2	Keg. Pengad. Peralatan Gedung Kantor - Blja Modal Pengad. Personâ Komputer - Blja Modal Pengad.Peralatan jaringan	47.250.000	47.230.000	Laptop	2	12.000.000	-	24.000.000	
				Komputer PC	1	10.250.000	-	10.250.000	
				Peralatan CPI	1	12.980.000	-	12.980.000	
3	Keg. Pemelh Gedung Bgn Kantor - Belanja Bahan Bangunan	20.000.000	19965.000	Pembuatan Teralis	1	19.965.000	-	19.965.000	
TOTAL		114.250.000	111.195.000				-	111.195.000	

Painan , 2 Januari 2018

 INSPEKTUR

Drs. YESEN NAWIARSIH
NIP. 19681017 198903 1 003

**INSPEKTORAT
KABUPATEN PESISIR SELATAN
REKAPITULASI PENERIMAAN DAN PENYETORAN PAJAK DAERAH
PER 31 DESEMBER 2017
TAHUN ANGGARAN 2017**

NO	URAIAN	PENERIMAAN PAJAK (Rp)	PENYETORAN (Rp)	%
1	Pajak Rumah Makan	10.037.500	9.618.750	95,83

Painan , 2 Januari 2018

[Signature] INSPEKTUR

Drs. YESPI NAWIARSIH
NIP. 19681017 198903 1 003

PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
LAPORAN PERTANGGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN
(SPJ BELANJA - FUNGSIONAL)

OPD : 3.00.01.01. - Inspektorat Daerah
Pegguna Anggaran : Drs. Yespi Nawiarsit
Bendahara Pengeluaran : Yenni Suryati
Tahun Anggaran : 2017
Bulan : Desember

(dalam rupiah) Halaman 1

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Barang & Jasa			SPJ UPI/GU/TU			Jumlah SPJ (LS+UPI/GU/TU) s.d. Bulan ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini		
1	2	3	4	5	6/4-5/1	7	8	9/7-8/1	10	11	12/10-11/1	13/6-9-12/1	14/3-13/1
5.	BELANJA DAERAH	7.651.771.129	3.779.254.338	393.160.788	4.172.415.126	-	-	-	2.944.796.993	224.527.462	3.169.324.455	7.341.739.581	310.031.548
5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	4.267.112.312	3.779.254.338	393.160.788	4.172.415.126	-	-	-	-	-	-	4.172.415.126	94.697.186
5.1.1.	BELANJA PEGAWAI	4.267.112.312	3.779.254.338	393.160.788	4.172.415.126	-	-	-	-	-	-	4.172.415.126	94.697.186
5.1.1.01.	Belanja Gaji dan Tunjangan	3.272.012.312	2.938.954.338	238.360.788	3.177.315.126	-	-	-	-	-	-	3.177.315.126	94.697.186
5.1.1.01.001.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	2.451.872.537	2.215.740.957	174.266.449	2.390.007.406	-	-	-	-	-	-	2.390.007.406	61.865.131
5.1.1.01.002.	Tunjangan Keluarga	220.044.955	196.107.202	16.807.778	212.914.980	-	-	-	-	-	-	212.914.980	7.129.975
5.1.1.01.003.	Tunjangan Jabatan	126.868.400	117.720.000	9.945.000	127.665.000	-	-	-	-	-	-	127.665.000	1.183.400
5.1.1.01.004.	Tunjangan Fungsional	205.268.000	183.150.000	17.100.000	200.250.000	-	-	-	-	-	-	200.250.000	5.018.000
5.1.1.01.005.	Tunjangan Fungsional lain	42.006.000	35.395.000	2.560.000	37.975.000	-	-	-	-	-	-	37.975.000	4.031.000
5.1.1.01.006.	Tunjangan Beras	131.080.200	115.292.640	10.662.384	125.955.024	-	-	-	-	-	-	125.955.024	5.125.176
5.1.1.01.007.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	10.128.205	3.737.332	340.191	4.077.523	-	-	-	-	-	-	4.077.523	6.050.682
5.1.1.01.008.	Pembulatan Gaji	32.907	28.343	2.359	30.702	-	-	-	-	-	-	30.702	2.205
5.1.1.01.009.	Iuran Jaminan Kesehatan	69.478.296	61.661.204	5.715.588	67.376.792	-	-	-	-	-	-	67.376.792	2.101.504
5.1.1.01.022.	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	5.885.694	4.498.467	418.234	4.916.721	-	-	-	-	-	-	4.916.721	968.973
5.1.1.01.023.	Iuran Jaminan Kematian (JKM)	7.357.118	5.623.173	522.805	6.145.978	-	-	-	-	-	-	6.145.978	1.211.140
5.1.1.02.	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	995.100.000	840.300.000	154.800.000	995.100.000	-	-	-	-	-	-	995.100.000	-
5.1.1.02.001.	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	995.100.000	840.300.000	154.800.000	995.100.000	-	-	-	-	-	-	995.100.000	-
5.2.	BELANJA LANGSUNG	3.384.658.817	-	-	-	-	-	-	2.944.796.993	224.527.462	3.169.324.455	3.169.324.455	215.334.362

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Baramg & Jasa			SPJ UPIGU/TU			Jumlah SPJ (LS+UPIGU/TU) s.d. Bulan ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini		
1	2	3	4	5	6(4+5)	7	8	9(7+8)	10	11	12(10+11)	13(6+9+12)	14(3-13)
3.00.3.00.01.01.12.	Penyediaan komponen instalasi listrik/perangan bangunan kantor	21.738.000	-	-	-	-	-	-	21.659.000	-	21.659.000	21.659.000	79.000
3.00.3.00.01.01.12.5 .2.2.01.003.	Belanja alat listrik/elektronik (lampu pijar, baterai,eteng)	9.738.000	-	-	-	-	-	-	9.738.000	-	9.738.000	9.738.000	-
3.00.3.00.01.01.12.5 .2.2.18.005.	Belanja Pemeliharaan Teras dan Lainnya	12.000.000	-	-	-	-	-	-	11.921.000	-	11.921.000	11.921.000	79.000
3.00.3.00.01.01.15.	Penyediaan bahan-bahan dan peraturan perundang-undangan	8.900.000	-	-	-	-	-	-	8.900.000	-	8.900.000	8.900.000	-
3.00.3.00.01.01.15.5 .2.2.03.005.	Belanja surat kabar/jurnal	3.900.000	-	-	-	-	-	-	3.900.000	-	3.900.000	3.900.000	-
3.00.3.00.01.01.15.5 .2.2.03.016.	Belanja Publikasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.00.3.00.01.01.15.5 .2.3.83.001.	Belanja modal Pendidikan Umum	5.000.000	-	-	-	-	-	-	5.000.000	-	5.000.000	5.000.000	-
3.00.3.00.01.01.17.	Penyediaan makan dan minuman	43.440.000	-	-	-	-	-	-	38.460.000	3.755.000	42.215.000	42.215.000	1.225.000
3.00.3.00.01.01.17.5 .2.2.11.001.	Belanja makanan/ minuman harian pegawai	5.720.000	-	-	-	-	-	-	5.120.000	600.000	5.720.000	5.720.000	-
3.00.3.00.01.01.17.5 .2.2.11.002.	Belanja makanan/ minuman rapat	16.335.000	-	-	-	-	-	-	12.365.000	2.750.000	15.115.000	15.115.000	1.220.000
3.00.3.00.01.01.17.5 .2.2.11.003.	Belanja makanan/ minuman tamu	21.385.000	-	-	-	-	-	-	20.975.000	405.000	21.380.000	21.380.000	5.000
3.00.3.00.01.01.18.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	203.875.000	-	-	-	-	-	-	203.044.943	750.000	203.794.943	203.794.943	80.057
3.00.3.00.01.01.18.5 .2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah dalam propinsi	83.825.000	-	-	-	-	-	-	82.995.000	750.000	83.745.000	83.745.000	80.000
3.00.3.00.01.01.18.5 .2.2.15.003.	Belanja perjalanan dinas luar daerah luar propinsi	120.050.000	-	-	-	-	-	-	120.049.943	-	120.049.943	120.049.943	57
3.00.3.00.01.01.20.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi Dalam Daerah	51.200.000	-	-	-	-	-	-	32.975.000	18.225.000	51.200.000	51.200.000	-
3.00.3.00.01.01.20.5 .2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	51.200.000	-	-	-	-	-	-	32.975.000	18.225.000	51.200.000	51.200.000	-

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Barang & Jasa			SPJ UPI/GU/TU			Jumlah SPJ (LS+UPI/GU/TU) s.d. Bulan ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini (4+5)	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini (7+8)	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini (10+11)		
1	2	3	4	5	6(4+5)	7	8	9(7+8)	10	11	12(10+11)	13(6+9-12)	14(3-13)
3.00.3.00.01.02.2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	262.98000	-	-	-	-	-	-	247.483.600	8.392.500	255.876.100	255.876.100	7.028.900
3.00.3.00.01.02.21	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	47.98000	-	-	-	-	-	-	44.000.000	-	44.000.000	44.000.000	3.000.000
3.00.3.00.01.02.25 .2.3.27.005	Belanja modal Pengadaan Alat Kantor Lainnya	47.98000	-	-	-	-	-	-	44.000.000	-	44.000.000	44.000.000	3.000.000
3.00.3.00.01.02.21	Pengadaan peralatan gedung kantor	47.28000	-	-	-	-	-	-	47.230.000	-	47.230.000	47.230.000	20.000
3.00.3.00.01.02.25 .2.3.29.005	Belanja modal Pengadaan Peralatan Jaringan	13.08000	-	-	-	-	-	-	12.980.000	-	12.980.000	12.980.000	20.000
3.00.3.00.01.02.25 .2.3.29.006	Belanja modal Pengadaan Personal Komputer	34.25000	-	-	-	-	-	-	34.250.000	-	34.250.000	34.250.000	-
3.00.3.00.01.02.21	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	20.96500	-	-	-	-	-	-	19.965.000	-	19.965.000	19.965.000	35.000
3.00.3.00.01.02.25 .2.2.02.001	Belanja bahan baku bangunan	20.00000	-	-	-	-	-	-	19.965.000	-	19.965.000	19.965.000	35.000
3.00.3.00.01.02.25 .2.2.02.001	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	144.68100	-	-	-	-	-	-	136.288.600	8.392.500	144.681.100	144.681.100	3.973.900
3.00.3.00.01.02.25 .2.2.05.001	Belanja Jasa Service	11.00000	-	-	-	-	-	-	10.100.000	900.000	11.000.000	11.000.000	-
3.00.3.00.01.02.25 .2.2.05.002	Belanja Penggantian Suku Cadang	76.62500	-	-	-	-	-	-	76.625.000	-	76.625.000	76.625.000	-
3.00.3.00.01.02.25 .2.2.05.003	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	51.77900	-	-	-	-	-	-	44.287.450	7.492.500	51.779.950	51.779.950	50
3.00.3.00.01.02.25 .2.2.05.005	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	5.27600	-	-	-	-	-	-	5.276.150	-	5.276.150	5.276.150	3.973.850
3.00.3.00.01.05.01	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	50.00000	-	-	-	-	-	-	39.299.500	9.695.200	48.994.700	48.994.700	1.005.300
3.00.3.00.01.05.01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	50.00000	-	-	-	-	-	-	39.299.500	9.695.200	48.994.700	48.994.700	1.005.300
3.00.3.00.01.05.01 .2.2.23.001	Belanja kursus-kursus singkat/pelatihan	50.00000	-	-	-	-	-	-	39.299.500	9.695.200	48.994.700	48.994.700	1.005.300

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Baramg & Jasa			SPJ UPI/GU/TU			Jumlah SPJ (LS+UP/GU/TU) s.d. Bulan ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini		
1	2	3	4	5	6(4+5)	7	8	9(7+8)	10	11	12(10+11)	13(6-9-12)	14(3-13)
3.00.01.3.00.01.20.	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	2.116.520.602							1.852.675.500	148.739.500	2.001.415.000	2.001.415.000	115.105.602
3.00.01.3.00.01.20.01.	Pelaksanaan Pengawasan Internal secara Berjalan	997.450.502							826.353.750	63.482.000	889.835.750	889.835.750	107.614.752
3.00.01.3.00.01.20.01.5.2.1.01.001.	Honorarium Pelaksanaan Kegiatan	10.600.000							10.700.000		10.700.000	10.700.000	100.000
3.00.01.3.00.01.20.01.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	15.162.502							15.162.500		15.162.500	15.162.500	2
3.00.01.3.00.01.20.01.5.2.2.01.006.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	55.600.000							52.522.250	3.077.000	55.599.250	55.599.250	750
3.00.01.3.00.01.20.01.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	52.848.000							44.899.000	7.940.000	52.839.000	52.839.000	9.000
3.00.01.3.00.01.20.01.5.2.2.08.001.	Belanja sewa Sarana/Infrastruktur Darat	14.400.000							13.200.000	1.200.000	14.400.000	14.400.000	
3.00.01.3.00.01.20.01.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	848.640.000							689.870.000	51.265.000	741.135.000	741.135.000	107.505.000
3.00.01.3.00.01.20.02.	Penanganan Kasus Peraduan di Lingkungan Pemerintah Daerah	512.618.000							490.332.500	22.185.000	512.517.500	512.517.500	100.500
3.00.01.3.00.01.20.02.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	13.629.500							13.629.500		13.629.500	13.629.500	
3.00.01.3.00.01.20.02.5.2.2.01.006.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	50.000.000							46.399.500	3.600.000	49.999.500	49.999.500	500
3.00.01.3.00.01.20.02.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	22.138.500							22.138.500		22.138.500	22.138.500	
3.00.01.3.00.01.20.02.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	410.450.000							396.720.000	13.710.000	410.430.000	410.430.000	20.000
3.00.01.3.00.01.20.02.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah dalam provinsi	16.400.000							11.445.000	4.955.000	16.320.000	16.320.000	80.000
3.00.01.3.00.01.20.05.	Inventarisasi Temuan Pengawasan	24.770.000							15.660.000	8.325.000	23.985.000	23.985.000	785.000
3.00.01.3.00.01.20.05.5.2.1.01.001.	Honorarium Pelaksanaan kegiatan	5.400.000							4.020.000	1.380.000	5.400.000	5.400.000	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Barang & Jasa			SPJ UPIGU/TU			Jumlah SPJ (LS+UPIGU/TU) s.d. Bulan ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.c. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini		
1	2	3	4	5	6(4+5)	7	8	9(7+8)	10	11	12(10+11)	13(6-9+12)	14(3-13)
3.00.01.3.00.01.20.1 5.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	500.000	-	-	-	-	-	-	250.000	250.000	500.000	500.000	-
3.00.01.3.00.01.20.1 5.5.2.2.08.001.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	1.200.000	-	-	-	-	-	-	1.200.000	-	1.200.000	1.200.000	-
3.00.01.3.00.01.20.1 5.5.2.2.11.005.	Belanja makanan dan minuman paniba	17.812.500	-	-	-	-	-	-	7.012.500	7.837.500	14.850.000	14.850.000	2.962.500
3.00.01.3.00.01.20.1 5.5.2.2.15.002	Belanja perjalanan dinas luar daerah dalam propinsi	4.100.000	-	-	-	-	-	-	4.100.000	-	4.100.000	4.100.000	-
3.00.01.3.00.01.20.1 5.5.2.2.25.001.	Uang untuk Dibentkan pada Pihak Ketiga	3.000.000	-	-	-	-	-	-	3.000.000	-	3.000.000	3.000.000	-
3.00.01.3.00.01.20.1 8.	Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	40.045.950	-	-	-	-	-	-	40.045.950	-	40.045.950	40.045.950	-
3.00.01.3.00.01.20.1 8.5.2.1.01.001.	Honorarium Pelaksana Kegiatan	14.050.000	-	-	-	-	-	-	14.050.000	-	14.050.000	14.050.000	-
3.00.01.3.00.01.20.1 8.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	3.962.500	-	-	-	-	-	-	3.962.500	-	3.962.500	3.962.500	-
3.00.01.3.00.01.20.1 8.5.2.2.01.006.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.683.450	-	-	-	-	-	-	1.683.450	-	1.683.450	1.683.450	-
3.00.01.3.00.01.20.1 8.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	250.000	-	-	-	-	-	-	250.000	-	250.000	250.000	-
3.00.01.3.00.01.20.1 8.5.2.2.08.001.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	1.200.000	-	-	-	-	-	-	1.200.000	-	1.200.000	1.200.000	-
3.00.01.3.00.01.20.1 8.5.2.2.11.005.	Belanja makanan dan minuman paniba	6.600.000	-	-	-	-	-	-	6.600.000	-	6.600.000	6.600.000	-
3.00.01.3.00.01.20.1 8.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah dalam propinsi	9.100.000	-	-	-	-	-	-	9.100.000	-	9.100.000	9.100.000	-
3.00.01.3.00.01.20.1 8.5.2.2.24.002.	Honorarium Tenaga Ahli/Warasumber/Instruktur	3.200.000	-	-	-	-	-	-	3.200.000	-	3.200.000	3.200.000	-
3.00.01.3.00.01.20.2 2.	Evaluasi Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) satuan kerja perangkat daerah	52.083.500	-	-	-	-	-	-	51.833.500	-	51.833.500	51.833.500	250.000
3.00.01.3.00.01.20.1 2.1.2.1.01.001	Honorarium Pelaksana Kegiatan	28.100.000	-	-	-	-	-	-	27.900.000	-	27.900.000	27.900.000	200.000
3.00.01.3.00.01.20.1 2.5.2.2.01.001	Belanja alat tulis kantor	3.195.500	-	-	-	-	-	-	3.195.500	-	3.195.500	3.195.500	-

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Barang & Jasa			SPJ UP/GUITU			Jumlah SPJ (LS+UP/GUITU) s.d. Bulan ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini		
1	2	3	4	5	6(4+5)	7	8	9(7+8)	10	11	12(10+11)	13(6+9+12)	14(3-13)
3.00.01.3.00.01.2 2.5.2.2.01.00.5	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	2.085.000							2.085.000		2.085.000	2.085.000	
3.00.01.3.00.01.2 2.5.2.2.06.00.1	Belanja cetak	500.000							500.000		500.000	500.000	
3.00.01.3.00.01.2 2.5.2.2.08.00.1	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	1.800.000							1.800.000		1.800.000	1.800.000	
3.00.01.3.00.01.2 2.5.2.2.11.00.1	Belanja makanan dan minuman panitia	8.800.000							8.800.000		8.800.000	8.800.000	
3.00.01.3.00.01.2 2.5.2.2.15.00.2	Belanja perjalanan dinas luar daerah dalam propinsi	5.750.000							5.750.000		5.750.000	5.750.000	50.000
3.00.01.3.00.01.2 2.5.2.2.24.00.2	Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur	1.800.000							1.800.000		1.800.000	1.800.000	
3.00.01.3.00.01.3 6.	Evaluasi dan Sosialisasi SPIP	69.520.000							39.547.000	20.016.500	59.563.500	59.563.500	1.008.500
3.00.01.3.00.01.3 6.5.2.2.01.00.1	Belanja alat tulis kantor	17.604.000							10.680.000	6.924.000	17.604.000	17.604.000	
3.00.01.3.00.01.3 6.5.2.2.01.00.1	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	617.000							617.000		617.000	617.000	8.500
3.00.01.3.00.01.3 6.5.2.2.06.00.1	Belanja cetak	5.280.000							1.300.000	3.980.000	5.280.000	5.280.000	
3.00.01.3.00.01.3 6.5.2.2.07.00.2	Belanja sewa gedung/kantor/tempat	4.500.000							3.000.000	1.500.000	4.500.000	4.500.000	
3.00.01.3.00.01.3 6.5.2.2.11.00.6	Belanja makanan dan minuman peserta	11.512.500							8.750.000	2.762.500	11.512.500	11.512.500	
3.00.01.3.00.01.3 6.5.2.2.15.00.2	Belanja perjalanan dinas luar daerah dalam propinsi	6.000.000							6.000.000		6.000.000	6.000.000	
3.00.01.3.00.01.3 6.5.2.2.24.00.2	Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur	12.450.000							6.400.000	4.050.000	12.450.000	12.450.000	1.000.000
3.00.01.3.00.01.3 6.5.2.2.25.00.1	Uang untuk Dibenkan pada Pihak Ketiga	1.500.000							800.000	700.000	1.500.000	1.500.000	
3.00.01.3.00.01.2	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	321.480.000							231.223.850	20.726.150	251.949.850	251.949.850	76.545.150

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Barang & Jasa			SPJ UPIGU/TU			* Jumlah SPJ (LS+UPIGU/TU) s.d. Bulan ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini		
1	2	3	4	5	6(4+5)	7	8	9(7+8)	10	11	12(10+11)	13(6+9+12)	14(3-13)
3.00.01.3.00.01.21.0 1.	Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawas	293.785.000							196.519.850	20.720.000	217.239.850	217.239.850	76.545.150
3.00.01.3.00.01.21.0 1.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan di luar daerah dalam provinsi	60.000.000							27.625.000	1.685.000	29.310.000	29.310.000	30.690.000
3.00.01.3.00.01.21.0 1.5.2.2.15.003.	Belanja perjalanan di luar daerah luar provinsi	113.785.000							94.339.850	10.335.000	104.674.850	104.674.850	9.110.150
3.00.01.3.00.01.21.0 1.5.2.2.23.001.	Belanja kursus-kursus singkat/pelatihan	120.000.000							74.555.000	8.700.000	83.255.000	83.255.000	36.745.000
3.00.01.3.00.01.21.0 3.	Pelatihan Khusus Aparatur Pengawasan pada Kantor Sendiri	34.704.000							34.704.000		34.704.000	34.704.000	
3.00.01.3.00.01.21.0 3.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	12.904.000							12.904.000		12.904.000	12.904.000	
3.00.01.3.00.01.21.0 3.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	2.250.000							2.250.000		2.250.000	2.250.000	
3.00.01.3.00.01.21.0 3.5.2.2.11.004.	Belanja makanan dan minuman pelatihan	6.050.000							6.050.000		6.050.000	6.050.000	
3.00.01.3.00.01.21.0 3.5.2.2.24.002	Honorarium Tenaga Ahli/Parasumber/Analis	12.700.000							12.700.000		12.700.000	12.700.000	
3.00.01.3.00.01.21.0 3.5.2.2.25.001.	Uang untuk Dibekalkan Pihak Ketiga	800.000							800.000		800.000	800.000	

	JUMLAH	7.661.712,9	3.779.254,338	393.160,788	4.172.415,126	0	-	0	2.944.796,993	224.527,462	3.169.324,455	7.341.739,581	310.031,548
Penerimaan :													
- SP2D													
		3.779.254,338	393.160,788	4.172.415,126	-	-	-	2.952.558,493	244.286,330	3.196.846,993	7.369.262,119		
- Potongan Pajak													
a. PPN													
		-	-	-	-	-	-	38.119,208	2.316,950	40.436,158	40.436,158		
b. PPh-21													
		77.274,832	13.830,191	91.105,023	-	-	-	10.072,750	1.656,000	11.728,750	102.833,773		
c. PPh-22													
		-	-	-	-	-	-	5.289,611	321,400	5.611,011	5.611,011		
d. PPh-23													
		-	-	-	-	-	-	1.783,900	166,000	1.949,900	1.949,900		
e. PPh-4 (2)													
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
f. Pajak Rumah Makan													
		-	-	-	-	-	-	7.993,000	1.625,750	9.618,750	9.618,750		
g. Pajak Hotel													
		-	-	-	-	-	-	-	125,000	125,000	125,000		
- Lain-lain													
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Jumlah Penerimaan :		3.856.529,170	406.990,979	4.263.520,149	-	-	-	3.015.816,962	250.499,600	3.266.316,562	7.529.836,711		
Pengeluaran :													
- SP/ILS+IP/IGU/TLH													
		3.779.254,338	393.160,788	4.172.415,126	-	-	-	2.944.796,993	224.527,462	3.169.324,455	7.341.739,581		
- Penyetoran Pajak													
a. PPN													
		-	-	-	-	-	-	32.449,586	7.986,572	40.436,158	40.436,158		
b. PPh-21													
		77.274,832	13.830,191	91.105,023	-	-	-	8.020,250	3.708,500	11.728,750	102.833,773		
c. PPh-22													
		-	-	-	-	-	-	4.460,356	1.150,655	5.611,011	5.611,011		
d. PPh-23													
		-	-	-	-	-	-	1.467,900	482,000	1.949,900	1.949,900		
e. PPh-4 (2)													
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
f. Pajak Rumah Makan													
		-	-	-	-	-	-	7.200,750	2.418,500	9.618,750	9.618,750		
g. Pajak Hotel													
		-	-	-	-	-	-	-	125,000	125,000	125,000		
- Lain-lain													
		-	-	-	-	-	-	1.050,000	26.472,538	27.522,538	27.522,538		
Jumlah Pengeluaran :		3.856.529,170	406.990,979	4.263.520,149	-	-	-	2.995.445,335	266.871,227	3.266.316,562	7.529.836,711		
Saldo Kas		-	-	-	-	-	-	16.371,627	(16.371,627)	-	-		

Mengetahui,
Pengguna Anggaran



Painan, 30 Desember 2017
Bendahara Pengeluaran

[Handwritten Signature]
Yenni Suryati
NIP. 196202272000122001